



**Pernyataan Sikap Bersama Pada May Day 2023**  
**Buruh Garmen Menuntut Akuntabilitas Perusahaan**  
Aliansi Upah Dasar Asia (AFWA)

Salam May Day untuk semua!

Tanggal 1 Mei bukan hanya hari untuk merayakan perjuangan dan langkah yang telah dibuat buruh/pekerja. Ini juga merupakan hari untuk menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengoreksi praktik tidak adil dan menindas secara sepihak dari perusahaan fesyen dalam memenuhi rantai pasokan garmen secara global dengan cara mengingkari kondisi kerja yang layak bagi pekerja garmen dan mengabaikan kehidupan buruh/pekerja yang bermartabat.

May Day ini, kami mengakui permintaan kolektif pekerja garmen se-Asia dan serikat pekerja mereka untuk mendesak akuntabilitas merek dalam rantai pasokan fesyen global. Aliansi Upah Dasar Asia (AFWA) menegaskan kembali komitmen kami untuk terus memperjuangkan upah layak, keadilan gender dan reformasi kebijakan dan peraturan rantai pasokan fesyen untuk kesejahteraan pekerja garmen di Asia.

**Meminta pertanggungjawaban Merek atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam rantai pasokan fesyen Global**

Praktik perdagangan perusahaan pemilik merek dan penolakan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia pada rantai pasokan mereka telah mengungkap distribusi kekuasaan yang tidak merata di industri fesyen.

Sudah tiga tahun sejak pandemi Covid-19, dan jutaan pekerja garmen Asia — yang sebagian besar adalah wanita — memproduksi untuk Perusahaan-perusahaan fesyen raksasa, masih belum dibayar upahnya, akibat mereka menghutangkan dan membatalkan pemesanan secara drastis maupun mengurangi pesanan secara massal.

Sementara beberapa faktor berkontribusi pada distribusi kekuasaan yang timpang ini, yang paling banyak relevan adalah upah yang memiskinkan diterima pekerja, membatasi mereka berbicara menentang ketidakadilan karena takut kehilangan pekerjaan. Merek fesyen memiliki tidak hanya mengabaikan peran mereka dalam spiral ke bawah dalam standar upah dalam produksi disetiap negara; mereka telah memanipulasi kerentanan ini untuk membuat sumber keputusan mereka yang membahayakan bagi kehidupan pekerja.

Dengan melakukan pencurian upah bahkan pada upah minimalis yang diterima pekerja, perusahaan pemilik merek secara langsung bertanggung jawab atas pekerja yang mengalami krisis kemanusiaan yang ekstrim. Kami akan terus mengambil tindakan hukum terhadap merek di negara pekerja, dan memulai dialog melalui kerangka kerja OECD melawan merek yang



menolak untuk bertanggung jawab atas pencurian upah besar-besaran yang mereka lakukan pekerja garmen dalam rantai pasokan mereka.

### **Merek harus menutup kesenjangan antara upah layak dan upah minimum**

Serikat pekerja dan organisasi buruh mencatat peran kunci pemerintah nasional dalam menerapkan undang-undang perburuhan yang adil dan upah minimum yang memadai untuk barang jadi garmen atau (Ready Made Garmen). Pekerja garmen di negara-negara seperti Bangladesh, Kamboja, India, India, Pakistan dan Sri Lanka, terus menuntut keadilan dan kenaikan yang sah dalam upah minimum yang memperhitungkan biaya hidup saat ini.

Namun dalam rantai pasokan garmen dengan ancaman relokasi merek fashion, bahkan pemerintah negara produksi memiliki kekuasaan yang terbatas. Merek, alih-alih menekan upah lebih jauh melalui sumber tentara bayaran mereka praktik, harus memastikan hak asasi manusia dengan menutup kesenjangan antara tingkat kemiskinan upah minimum dan upah layak.

Merek harus mendukung permintaan serikat pekerja untuk upah minimum yang adil di negara-negara produksi dan menyesuaikan praktik pembelian mereka untuk berkontribusi terhadap upah layak dalam rantai pasokan mereka. Kontribusi ini merupakan sebagian kecil dari keuntungan besar perusahaan fesyen. Misalnya kontribusi tersebut akan mencegah pekerja masuk kedalam jurang kemiskinan ekonomi berikutnya krisis. Tutup celahnya! Memajukan Upah Layak untuk mewujudkan upah layak bagi pekerja garmen!

### **Merek harus mendukung inisiatif yang dipimpin pekerja untuk memberantas Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender**

Lebih dari 80% pekerja garmen adalah perempuan, mengakhiri kekerasan berbasis gender dan pelecehan (GBVH) di lantai pabrik adalah prioritas. AFWA menjunjung tinggi pentingnya prakarsa yang dipimpin pekerja dan serikat pekerja dalam mencegah dan memulihkan berbasis gender kekerasan dan pelecehan (GBVH), dan mengajukan perjanjian mengikat yang dapat ditegakkan dengan serikat pekerja sebagai solusi pemberantasan kekerasan di tempat kerja.

Perjanjian Dindigul untuk Mengakhiri Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender merupakan salah satunya contoh yang dapat dirujuk, di mana perusahaan pemilik merek berkomitmen untuk tenaga kerja dan aliansinya untuk membangun hubungan dalam rantai pasokan mereka untuk mendukung program yang dipimpin oleh pekerja atau serikat pekerja di pabrik. Kami mendesak lebih banyak Perusahaan Merek Raksasa untuk menandatangani pengikatan yang dapat ditegakkan kedalam perjanjian mengikat untuk memastikan kepatuhan dengan konvensi



hak asasi manusia internasional, sehingga meningkatkan tingkat retensi, produktivitas, dan kepercayaan pekerja terhadap tempat kerja

### **Membangun Kekuatan Penuh untuk Serikat Pekerja**

Komponen kunci dari perjanjian semacam itu adalah hak pekerja yang tidak dapat diganggu gugat untuk mengembangkan daya tawar, untuk mendemokratisasi rantai pasokan global. Ini kondisi sentral untuk menegaskan dan menegosiasikan hak-hak lain. Di pasca-Covid, di mana industri garmen masih belum pulih dari dampak upah kemiskinan, miskin kesehatan dan tingkat gizi, dan tingkat GBVH yang tinggi, serikat pekerja lebih dibutuhkan dari sebelumnya untuk menyuarakan keprihatinan pekerja.

May Day ini, kami menegaskan kembali hak pekerja untuk memperkuat serikat pekerja dan secara kolektif tawar-menawar untuk kondisi kerja yang lebih baik, keadilan gender dan upah layak, dengan perusahaan pemilik merek untuk membayar pekerjaan yang layak dan upah yang lebih baik. Kita butuh komitmen merek yang mengikat dan dapat ditegakkan dengan serikat pekerja yang mewakili pekerjanya.

Mari kita berdiri bersama dalam solidaritas dan menuntut keadilan bagi semua pekerja. Perjuangan untuk upah yang adil dan kondisi kerja yang layak terus berlanjut, dan kami tidak akan berhenti sampai pekerja menerima rasa hormat dan martabat yang layak mereka terima. Masa depan pekerjaan dipertaruhkan, dan kami menuntut agar merek mengambil tanggung jawab mereka dengan serius.